

**Kaji Dua Moda Transportasi Publik
Percepatan Implementasi
Bus Listrik dan Garap Studi Kelayakan Kereta Api**



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Kamis,20/06/2024

SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda tengah mengkaji dua moda transportasi publik untuk diwujudkan di kota ini, yaitu bus kota dan kereta api.

Untuk bus kota, Dishub sedang menghitung kebutuhan anggaran dan skema pengadaannya. Skema yang dipertimbangkan pengadaan oleh pemerintah untuk dikerjakan Perumda Varia Niaga.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu mengatakan, pihaknya akan segera mempresentasikan hasil penghitungan anggaran (*business plan*) kepada Wali Kota Samarinda. “Kami masih menunggu jadwal Wali Kota,” ujarnya, Rabu (19/6). Dia menjelaskan bahwa skema yang paling memungkinkan dalam waktu dekat adalah pengadaan oleh pemerintah dan diserahkan ke Perusda. Dengan moda bus listrik. Kebutuhannya sekitar 63 unit untuk tujuh trayek. Rinciannya setiap trayek disiapkan 9 unit. Tujuh beroperasi, sisanya sebagai cadangan. “Ini akan dikolaborasikan antara bus dengan BBM fosil untuk trayek menanjak. Sedangkan trayek yang cenderung datar, menggunakan kendaraan listrik,” jelasnya.

Di samping itu pihaknya juga akan mempresentasikan kebutuhan untuk angkot listrik sebagai *feeder*. Yakni angkutan umum massal untuk mengantar warga dari pemukiman menuju ke terminal pemberhentian utama sebelum menuju moda bus. “Meningkat saat ini, diperkirakan hanya 15 dari 400 lebih angkot di Samarinda yang memenuhi syarat

beroperasi. Oleh karena itu, Walikota mendorong agar pengadaan transportasi massal listrik ini dimulai pada APBD Perubahan tahun ini,” ucapnya.

“Jika pengelola angkot konvensional keberatan, kami bisa adu argumen. Banyak perizinan yang tidak diurus. Atau, kami bisa meminta para sopir mendaftar ke Perumda Varia Niaga sebagai operator jika skema ini disetujui,” sambungnya.

Sementara itu, dia menambahkan tahun ini untuk moda transportasi lain juga dikerjakan yakni studi kelayakan kereta api. Diakuinya pihaknya sedang melakukan FS (*feasibility study*) trase untuk diusulkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas). “Tahapannya masih panjang. Paling cepat konstruksi bisa dilakukan di tahun 2030-2031. Bus dan angkot listrik kemungkinan menjadi moda transportasi publik yang paling cepat diimplementasikan di Samarinda,” pungkasnya. **(dra)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Kaji Dua Moda Transportasi Publik Percepatan Implementasi Bus Listrik dan Garap Studi Kelayakan Kereta Api, 20/06/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian diatur sebagai berikut:
 - (1) Untuk mewujudkan tatanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan rencana induk perkeretaapian.
 - (2) Rencana induk perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. rencana induk perkeretaapian nasional;
 - b. rencana induk perkeretaapian provinsi;
 - c. rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota.
2. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan, percepatan program KBL berbasis baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui:
 - a. percepatan pengembangan industri KBL berbasis baterai dalam negeri;
 - b. pemberian insentif;
 - c. penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan tarif tenaga listrik untuk KBL berbasis baterai;
 - d. pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBL berbasis baterai; dan
 - e. perlindungan terhadap lingkungan hidup.

3. Dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) Provinsi Kalimantan Timur diatur bahwa pemerintah daerah secara periodik melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan jaringan transportasi di wilayah Kalimantan Timur.